

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

AGUNG WICAKSONO

NPM: 11 833 0045



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi**

Oleh :

AGUNG WICAKSONO

NPM: 11 833 0045



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

**Judul Skripsi : Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen
Laba Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek
Indonesia**

Nama Mahasiswa : Agung Wicaksono

Nomor Stambuk : 11 833 0045

Prodi : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si)
Ak, MMA)**

(Dra. Hj. Rosmaini

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

**(Linda Lores SE, Msi)
SE, Msi)**

(Dr. Ihsan Effendi,

Tanggal lulus :

2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen dalam penelitian ini yang digunakan sebagai proksi mekanisme *corporate governance*, adalah ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan investasi. Sedangkan manajemen laba, sebagai variabel dependen, diukur dengan menggunakan dasar rasio modal kerja akrual.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengunduh data laporan keuangan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 industri perbankan dengan periode penelitian 2012-2014. Sehingga diperoleh data observasi sebanyak 40 data. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f dan uji t. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan melalui website www.idx.co.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan mekanisme *Corporate governance* terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Proksi mekanisme *Corporate governance* lainnya (ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan investasi) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba secara parsial.

Kata Kunci : ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan investasi, manajemen laba.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia”. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya kepada umat manusia. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Prof Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2 Bapak Dr. Ihsan Efendi, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
- 3 Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.
- 4 Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, Msi selaku Dosen Pembimbing I, banyak terima kasih atas ilmu, bimbingan dan waktu yang diberikan.
- 5 Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan serta masukan yang diberikan.

- 6 Ucapan terima kasih yang tak ternilai penulis ucapkan kepada Ayahanda Terus dan Ibunda Srihartati tercinta untuk kesabaran dan nasihat serta do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Kepada keluarga, Terima kasih karena selalu mengasihi dan menjadi inspirasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8 Terima kasih kepada My Lovely Nurmala Sari yang selalu mengasihi dan terus memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 9 Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga kecil yang banyak berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Abdi, Gunawan, Heri, Yoga, Uciyana beserta keluarga manis manja lainnya, juga seluruh sahabat Akuntansi stambuk 2011.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharap kritik dan saran yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Medan, Desember 2015

Penulis

Agung Waicaksono

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Perumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A.Uraian Teoritis	11
1. Teori Corporate Governance	11
a. Teori Stakeholders	11
b. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
c. Stewardship theory.....	13
2. Prinsip-prinsip Corporate Governance	14

3. Peraturan tentang Corporate Governance.....	16
4. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG.....	20
5. Mekanisme Corporate Governance	22
a. Dewan Komisaris	22
b. Komite Audit.....	23
c. Investasi.....	25
6. Manajemen Laba	26
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka konseptual.....	32
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian.....	34
1. Jenis penelitian	34
2. Lokasi Penelitian	34
3. Waktu Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi	35
2. Sampel	36
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	37
1. Variabel Independen (Bebas)	37

2. Variabel Dependen (Terikat).....	38
D.Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Jenis Data.....	40
2. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	41
3. Uji Asumsi Klasik	41
a. Uji Normalitas.....	41
b. Uji Multikolonieritas.....	41
c. Heteroskedastisitas.....	42
d. Uji Autokorelasi.....	42
2. Analisis Regresi Berganda.....	43
3. Uji Statistik.....	43
a. Uji R² atau Koefisien Determinasi.....	43
G.Pengujian Hipotesis.....	45
1. Uji f.....	45
2. Uji t.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A.Hasil Penelitian	47
B.Hasil Analisis	47

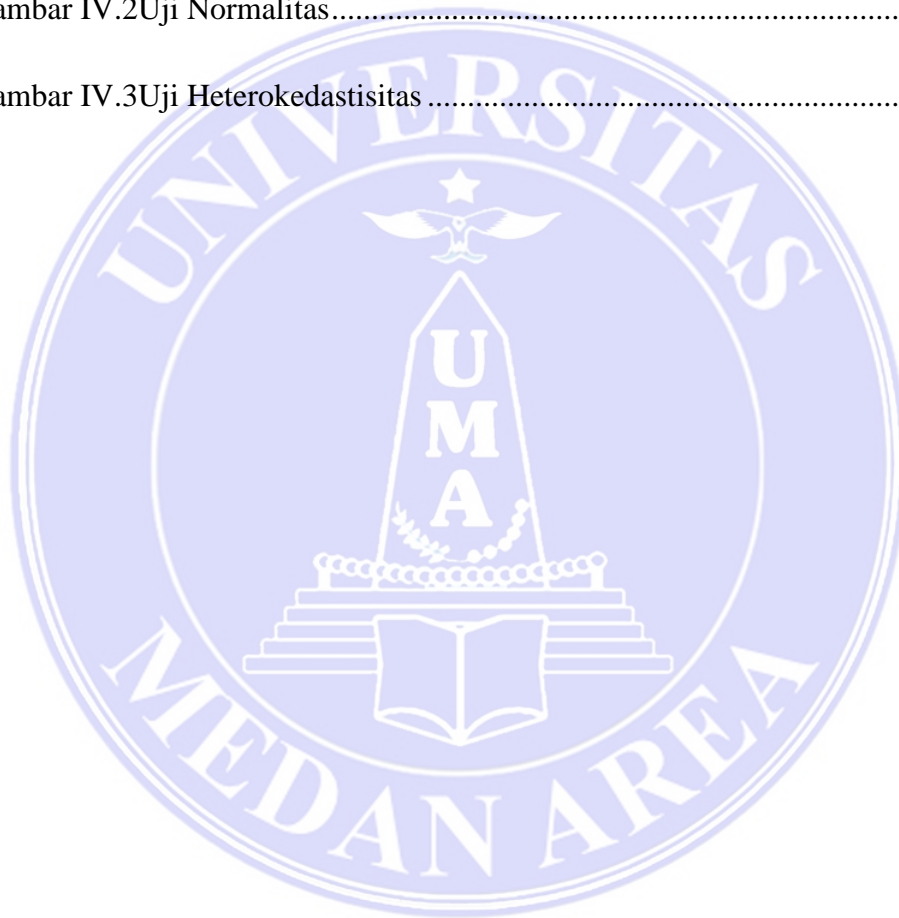
1. Uji Asumsi Klasik	47
a. Uji Normalitas	48
b. Uji Multikoloniaritas	52
c. Uji Heterokedastisitas	53
d. Uji Autokorelasi	54
2. Analisis Regresi Berganda	55
3. Uji Statistik	57
a. Uji R^2 Koefisien Determinasi	57
C. Pengujian Hipotesis	59
1. Uji Signifikan Simultan (F)	59
2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)	60
D. Pembahasan hasil penelitian	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Keterbatasan dan Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka konseptual	32
Gambar IV.1 Uji Normalitas	50
Gambar IV.2 Uji Normalitas	51
Gambar IV.3 Uji Heterokedastisitas	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran i : Daftar Populasi dan Sampel tahun 2010-2014

Lampiran ii : Data Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit dan
Investasi tahun 2010-2014

Lampiran iii : Data Manajemen Laba tahun 2010-2014

Lampiran iv : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Rencana Waktu Penelitian	35
Tabel III.2 Daftar sampel perusahaan	37
Tabel IV.1 Uji Normalitas	49
Tabel IV.2 Uji Multikolonieritas	52
Tabel IV.3 Uji Autokorelasi	55
Tabel IV.4 Analisis Regresi.....	56
Tabel IV.5 <i>adjusted R2</i>	57
Tabel IV.6 Descriptive Statistics	58
Tabel IV.7 Pemasukan dan pengeluaran variabel	59
Tabel IV.8 Uji Signifikan Simultan (f).....	60
Tabel IV.9 Uji Signifikan Parsial (t)	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury report* (Tjager et al.,2003 Thomas S. Kaihatu,2006).Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang *corporate governance* baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga – lembaga yang sangat *concern* pada isu ini.Namun demikian, pada umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama,seperti yang dikemukakan oleh shleifer dan Vishny dalam Hamonangan siallagan (2006) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manager atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manager. Definisi ini lebih menekankan pada fungsi dari mekanisme *corporate governance* agar dapat melakukan pengawasan dan memberikan keamanan terhadap *shareholder* pada investasi yang ditanamkannya.

Di Indonesia, isu mengenai *good Corporate governance* mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Sejak saat itulah , pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang lebih dalam praktek *Corporate governance*. Harus dipahami, bahwa kompetisi global

bukanlah kompetisi antar negara, melainkan antar korporat di negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian suatu Negara bergantung pada korporat masing-masing. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar (Moeljono, 2005 dalam Kaihatu, 2006).

Definisi Good Corporate Governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 adalah “suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”. Sehubungan dengan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor :

KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan pedoman GCG Perbankan Indonesia. Sejak pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG pada sektor perbankan, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten. Diluar negeri terjadi pula perkembangan dalam penerapan GCG. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah merevisi *Principles of Corporate Governance* pada tahun 2004. Tambahan penting dalam pedoman baru OECD adalah adanya penegasan tentang perlunya penciptaan kondisi oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. Peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan dibidang audit dan pasar modal. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak

mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor : KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka keputusan Menko Ekuin Nomor : KEP/31/M.EKUIIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKGC dinyatakan tidak berlaku lagi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004)

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable disektor korporat. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal

yang lain sesuai dengan hak tanggung jawabnya (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003).

Mekanisme *corporate governance* mampu meminimalkan tindakan manajemen laba atas apa yang telah dilakukan manajer perusahaan. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu : struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi, dan mekanisme eksternal itu : pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal (babic, 2001) dalam Nuryaman (2008).

Adapun mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1995 menjelaskan bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Keberadaan Komite Audit yang memiliki peranan dalam pengawasan pengelolaan perusahaan dan sebagai penghubung pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian, hal ini diatur dalam KEP.29/PM/2004. Cornet *et al.* (2006) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa tindakan pengawasan oleh investor institusional dapat mendorong investor untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan yang akan mengurangi perilaku *opportunistic*, sehingga kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, yang dapat mengurangi manajemen laba. Dalam mendeteksi manajemen laba digunakan model yang diajukan oleh Beaver dan Engel (1996). Model tersebut menggunakan komponen penyisihan

kerugian piutang (*allowances for loan losses*) dan provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan. Model ini merupakan model yang paling sesuai dalam mendeteksi praktisi manajemen laba di perusahaan perbankan (Rahmawati, 2006). Dalam penelitian ini komponen total akrual ditunjukkan oleh cadangan kerugian piutang yang dalam operasi perusahaan perbankan ditunjukkan oleh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang dimaksud dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif.

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000) dalam Rahmawati (2006).

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (Rahmawati, 2006). Untuk menjalankan aktifitasnya perbankan harus mempunyai integritas tinggi supaya masyarakat memiliki kepercayaan dalam rangka menjalin

hubungan kerja. Penilaian atas status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak), Bank Indonesia (BI) menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam menentukannya. Oleh karena itu, manajer memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Badridwan, 2006) dalam Nasution (2007). Laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana (Setiawati dan Na'im, 2001) dalam Nasution (2007). Seperti yang dikemukakan diatas bahwa perbankan adalah perusahaan "kepercayaan". Apabila perusahaan diketahui melakukan tindak manajemen laba otomatis kepercayaan investor akan berkurang dan satu persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana sehingga bisa menimbulkan *rush*. Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan good corporate governance, salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum yang selanjutnya diubah dengan peraturan No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank-bank umum (Forum for Corporate Governace in Indonesia, 2008).

Konsep good Corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memonitor kinerja bank dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima retur yang seusai dengan investasi yang telah ditanamkannya.

Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global. Wujud dari komitmen ini adalah dengan memasukkan penerapan GCG menjadi bagian dari misi BEI dalam rangka meningkatkan daya saing untuk menarik investor dan emiten. Di samping itu implementasi GCG pada BEI dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perseroan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan kualitas informasi keuangan untuk publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul : **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba merumuskan masalah dasar dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia ?
2. Apakah keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia ?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia
2. Pengaruh keberadaan komite audit independen terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia
3. Pengaruh investasi terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi investor dan kreditor
Stakeholders dari perusahaan publik yakni bermanfaat memberikan informasi pengaruh keberadaan dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba, sehingga dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi
2. Bagi perusahaan
Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan pada perusahaan perbankan, yaitu memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh keberadaan dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba, sehingga mengurangi tindak manajemen laba pada

internal perusahaan dan yang akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan terbebas dari kecurangan akuntansi

3. Bagi kalangan akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literature untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi dimasa mendatang khususnya mengenai fenomena manajemen laba.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Teori Corporate Governance

a. Teori Stakeholders

Pengertian stakeholders atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (BUMN) karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan (BUMN). Perusahaan tidak hanya memandang bahwa stakeholders adalah investor dan kreditor saja, melainkan antara lain pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan. “Pemerintah dapat dikatakan sebagai stakeholders bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis” (Sarwako, 2003). Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah. Pelanggan dianggap sebagai salah satu stakeholders dari suatu perusahaan karena

pelanggan memberikan kontribusi pendapatan dari pemakaian produk atau jasa perusahaan. Secara umum pelanggan menuntut agar produk atau jasa tersebut dapat dipercaya dengan tingkat harga yang seminimal mungkin, serta menuntut pula adanya pelayanan yang diberikan oleh produk, garansi yang cocok, riset dan pengembangan perbaikan produk dan jasa. Pemasok merupakan salah satu stakeholders dengan tuntutan adanya sumber usaha yang berkelanjutan, pelaksanaan dari perjanjian kredit yang tepat waktu, hubungan yang profesional dalam pengontrakan untuk pembelian dan penerimaan barang dan jasa. Karyawan dianggap pula sebagai pihak yang mempunyai pengaruh bagi kegiatan operasional perusahaan. Karyawan mengharapkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang dinamis yang memberikan imbalan yang memuaskan dan yang mendorong untuk pengembangan keahlian, pengetahuan dan karir. Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting stakeholders dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap stakeholders, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan stakeholders agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam tesisnya, Sarwako (2003) menyimpulkan “salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan stakeholders adalah dengan menerapkan GCG secara efektif”.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Sheifer dan Vishny 1997).

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri :

- 1) *The monitoring expenditure by the principal (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari agent dalam mengelola perusahaan.
- 2) *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent tidak bertindak yang merugikan principal.
- 3) *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agent karena adanya hubungan agensi.

c. Stewardship theory

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipals, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Selanjutnya (Chinn, 2000) Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

2. Prinsip-prinsip Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan.

Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. *Independency* (Independensi)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

3. Peraturan tentang Corporate Governance

1. Peraturan dari Keputusan Menteri BUMN :

- Kep-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2000. Peraturan tentang pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Yaitu bahwa komite audit bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.
- Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Peraturan tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No : Kep-23/M-PM
- PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000. Yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan good Corporate governance secara konsisten dan menjadikan prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya.

2. Peraturan dari Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 Yaitu tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003. Yaitu tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test), dimana calon direksi

dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank.

- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.

3. Peraturan dari Bapepam :

- Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG, yang mengisyaratkan adanya kewajiban dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.
- Peraturan Bapepam No. VII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.
- Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan ini merupakan salah satu peraturan Baepam yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan.
- Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan Perusahaan Terbuka. Peraturan ini menunjukkan bagaimana prinsip kewajiban, transparansi dan akuntabilitas diterapkan.

- Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten. Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS
Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS
- Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan mengenai Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS, termasuk penggunaan hak suara.
- Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emitan untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan dan keputusan investor.
- Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Peraturan ini memuat kewajiban untuk

menyampaikan penggunaan dan yang diperoleh dari penawaran umum kepada public.

- Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa dan public, serta memuat kewajiban untuk melakukan tender offer.
- Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan tender offer, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.
- Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Peraturan ini merupakan peraturan yang mengimplementasikan secara konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam.
- Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit. Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan public dimohonkan pernyataan pailit.
- Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi

sekretaris perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan adalah untuk menghubungkan antara perusahaan public atau emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanam modal.

- Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan. Peraturan ini diterbitkan dengan maksud meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good Corporate governance) bagi emiten dan perusahaan public terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.

4. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Penilaian (assessment)

Penilaian (assessment) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua)

tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN. Penilaian dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku. Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Sebelum melaksanakan penelitian, penilai menandatangani perjanjian kerja dengan Direksi BUMN yang terkait. Perjanjian tersebut mengatur tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Hasil penilaian dilaporkan kepada RUPS/ Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

2. Evaluasi (review)

Evaluasi (review) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (self assessment). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten, tetapi penilai independen atau Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Sekretaris Kementerian BUMN.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

5. Mekanisme Corporate Governance

Adapun mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam KNKG (2006) diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dewan dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

b. Komite Audit

Dalam FCGI (2003) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah didalam kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan. Komite Audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007), adapun yang menjadi tujuan dari adanya komite audit dalam sautu perusahaan adalah :

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan.
2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai.
3. Melakukan pengawasan dan menindak lanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Memberikan rekomendasi pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

Keberadaan komite audit juga diatur melalui surat edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2002. Dalam pelaksanaan tugasnya komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan kedisiplinan dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris

Sedangkan sesuai dengan Kep.29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tertulis tugas dari komite audit adalah :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data , dan rahasia perusahaan.

c. Investasi

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal kedalam usulan investasi harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan hasil yang diharapkan (Hasnawati, 2005), menurut *signaling theory* pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dana untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam keputusan pendanaan yang di hubungkan dengan sumber dana adalah apakah sumber internal dan eksternal, besarnya hutang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe hutang dan modal yang akan digunakan, mengingat struktur pembiayaan akan menentukan cost of capital yang menjadi dasar penentuan required return yang diinginkan (Hasnawati, 2005).

Para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk deviden maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, sehingga kebijakan deviden penting untuk memenuhi harapan pemegang saham terhadap deviden dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan disisi lain. Dividen yang diterima pada saat ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima dimasa yang akan datang, sehingga investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih menyukai deviden daripada capital gain (Prihantoro, 2003).

6. Manajemen Laba

Dalam hubungannya dengan keagenan, manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Manajer melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan.

Copeland (1968 :10) dalam Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Dari definisi tersebut manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Princip (GAAP)*.

Motivasi untuk melakukan manajemen laba menurut Stice, Stice & Sousem (2004;421) antara lain :

1. Memenuhi target internal (target laba, target penjualan)
2. Memenuhi harapan eksternal (*stakeholder*)
3. Meratakan atau memuluskan laba (*income smoothing*)
4. Mendandani angka laporan keuangan (*window dressing*) untuk penjualan saham perdana (IPO) atau memperoleh pinjaman.

Scott dalam Restie (2010) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba.

1. *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk mengatur laba bersih tersebut

sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka berdasarkan *compensation plans* perusahaan.

2. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan aturan yang lebih kuat.

3. *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

4. *Pergantian CEO*

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Demikian juga dengan CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba agar tidak diberhentikan.

5. *Initial Publik Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan go publik belum memiliki harga pasar sehingga menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang go publik melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

6. Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga laba perlu disajikan agar investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi *Discretionary Accrual* (DA). Sedangkan yang dimaksud dengan *Discretionary Accrual* adalah komponen akrual yang berbeda dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba berbeda dengan perataan laba (*income smooting*) karena perataan laba (*income smooting*) adalah tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. Oleh karena itu perataan laba (*income smooting*) merupakan bagian dari manajemen laba.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan Ujijanto dan Pramuka (2007). Pengujian antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba, keberadaan komite audit juga mampu mengurangi manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memenuhi tanggungjawabnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme *corporate governance* telah efektif mengurangi manajemen laba perusahaan. Pengujian antara komposisi dewan komisaris,

ukuran dewan komisaris dan komite audit dimana komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba hal ini menandakan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diajukan melalui pihak independen dalam komisaris mampu mengurangi tindakan manajemen laba. Selain itu ukuran dewan komisaris mampu mengurangi tindakan manajemen laba, untuk itu dewan komisaris yang lebih sedikit jumlahnya jauh lebih efektif mengurangi dalam tindakan manajemen laba karena dapat menghambat munculnya masalah keagenan.

Variabel independen yang diukur menggunakan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel pengukuran tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini karena penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena hanya untuk memenuhi regulasi saja, selain itu penerapan *corporate governance* masih merupakan hal baru di Indonesia yang efek dari penerapan *corporate governance* baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama (Sefiana, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan Nasution dan Doody (2007) pengujian antara komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dengan manajemen laba, menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* telah aktif mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan.

Penelitian yang dilakukan Nuryaman (2008) pengujian antara konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris dan kualitas audit

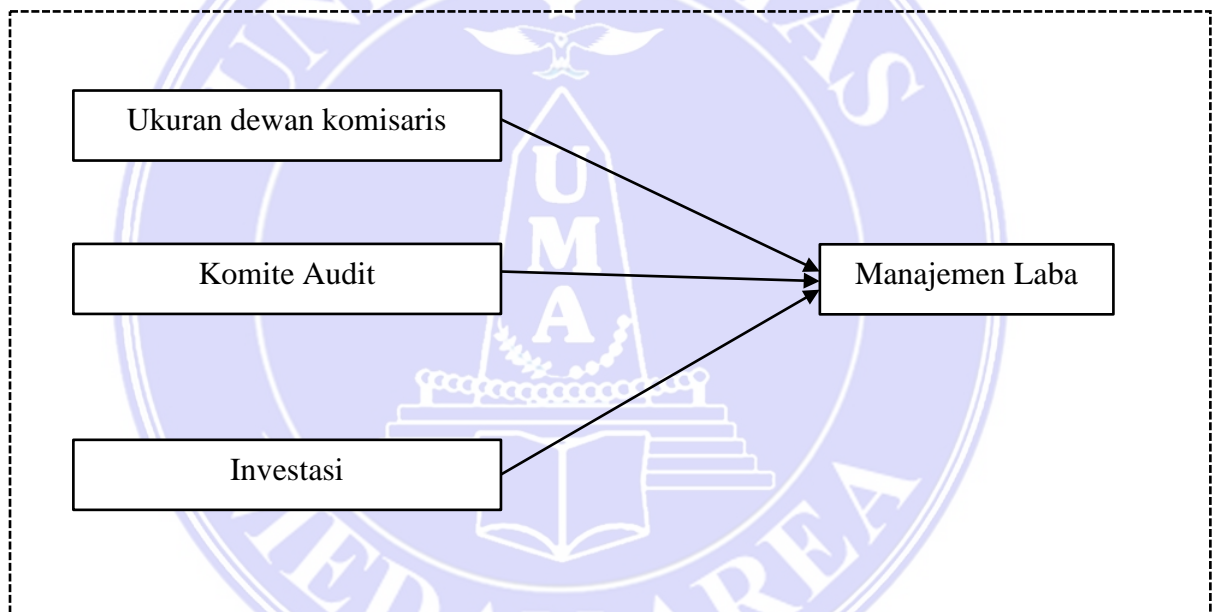
dengan proyeksi spesialisasi Industri Kantor Publik (KAP) dengan manajemen laba. Menghasilkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kualitas audit dengan proyeksi spesialisasi Industri Kantor Publik (KAP) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Siregar dan Sidarta (2006) bahwa variabel ukuran perusahaan secara konsisten mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap besaran pengelolaan yang dilakukan perusahaan, artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya.

Popy (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Variabel dependennya adalah manajemen laba. Sampel penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan tahun pengamatan 2008-2010. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusioanal, Proporsi dewan komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama tidak mempengaruhi manajemen laba.

C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008:54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1

Kerangka konseptual

Sumber : (di olah dari sub bab I.1, I.2, dan II.1)

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Landasan Teori

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan variabel dependen berupa manajemen laba dengan variabel independen yang meliputi jumlah dewan komisaris, komite audit dan investasi.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka hipotesa yang dapat dilakukan peneliti adalah :

1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba
2. Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.
3. Investasi memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. “Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dibentuk adalah hubungan sebab akibat” (Sugiyono, 2007:11).

2. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia”, maka penulis mengadakan penelitian pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2010-2014.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai September sampai dengan Desember 2015. Dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September 2015				Oktober 2015				November 2015				Desember 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data																
2	Seminar proposal																
3	Revisi proposal																
4	Pengumpulan data dan hasil																
5	Pembahasan hasil																
6	Seminar hasil																
7	Revisi seminar hasil																
8	Sidang meja hijau																

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, suatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada tahun 2010-2014 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Adapun perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2014
- 2) Perusahaan perbankan yang selama tahun penelitian 2010-2014 tidak mengalami delisted
- 3) Perusahaan secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama tahun penelitian 2010-2014
- 4) Perusahaan yang dalam laporan keuangan mempunyai data kepemilikan saham oleh perusahaan selama tahun penelitian 2010-2014
- 5) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2010-2014

Tabel III.2
Daftar sampel perusahaan

No	Kode	Nama Bank
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBKP	Bank Bukopin Indonesia Tbk
3	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
4	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
7	BSIM	Bank Sinarmas Indonesia Tbk
8	BMRI	Bank Mandiri (persero) Tbk

Sumber : Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) diakses September 2015

C. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Ukuran dewan komisaris, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dari seluruh jumlah komisaris perusahaan.

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

- Keberadaan Komite Audit, adalah suatu komite yang terdiri dari tiga atau lebih anggota yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan untuk melakukan pengujian dan penilaian kewajaran laporan yang dibuat perusahaan. Keberadaan komite audit diukur berdasarkan persentase jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komite audit. Perhitungan dari komite audit adalah :

$$\text{komite audit} = \frac{\text{jumlah anggota komite audit}}{\text{jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

- Investasi, yaitu berdasarkan total ekuitas pada perusahaan sampel

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi (Schipper, 1989).

Penggunaan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1995), model tersebut dituliskan sebagai berikut :

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai berikut :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_t}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_t}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{it-1}} \right)$$

Selanjutnya *Discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktifitas operasi perusahaan i pada periode ke t

$A_{it} - 1$ = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t

ΔRec_t = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = *error terms*

Apabila besarnya $DA = 0$ maka diindikasikan perusahaan tidak melakukan manajemen laba. Jika DA bernilai positif berarti terdapat indikasi perusahaan

tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Jika DA bernilai negative maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Meliputi laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam Indonesia Capital Market Directory dan situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat time series, yaitu sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa waktu tertentu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulan dari perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengkaji. Data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan dalam periode pengamatan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD), dan website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta dari situs perusahaan sampel.

F. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua variabel dependen dan independen.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas yaitu :

- a) Nilai R square (R^2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat.
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c) Melihat nilai colerance dan variance inflantionfactor (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai apabila mempunyai nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2006).

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas).

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05 , maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson. Jika d lebih kecil dibandingkan

dengan d_l atau lebih besar dari $4-d_l$, maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autorelokasi. Jika terletak diantara d_u dan $4-d_u$, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat autorelokasi.

2. Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 UDK + \beta_2 KKA + \beta_3 UKP + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

α : konstanta

β : koefisien

DA_{it} : *discretionary accrual*

UDK : ukuran dewan komisaris

KKA : keberadaan komite audit

INV : investasi

ε : koefisien error

3. Uji Statistik

a. Uji R_2 atau Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adjusted R_2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilainya

berkisar antara nol dan satu. Biasanya pada data time series mempunyai nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi. Adapun kelemahannya yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Tiap tambahan satu variabel independen maka adjusted R pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R_2) merupakan cara untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi. Menurut Damodar Gujarati (1998:98) dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R_2) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari fungsi tersebut.

Untuk mencari rumus R_2 digunakan rumus dari Damodar Gujarati (2010) :

$$R_2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum \hat{y}_1^2}{\sum y_1^2} = \frac{b_{1,2,3} \sum x_2 y_1 + b_{13,2} \sum x_3 y_1}{\sum y_1^2}$$

$$R_2 = \frac{(k-1)F}{(k-1)F + (n-k)}$$

Nilai R_2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 < R_2 < 1$). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika R_2 berkisar antara 0 dan 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai baik.
2. Jika R_2 menjauhi angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat jauh atau tidak erat, dengan kata lain model tersebut dapat dinilai kurang baik.

G. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan secara parsial (uji t). Uji t digunakan untuk menghitung masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji ini hipotesis 1 sampai dengan 4 atau H1 sampai dengan H4 diuji dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Uji f

Uji f digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut :

- Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
- Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

2. Uji t

Pada uji t nilai hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bila t hitung lebih besar t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tersebut.

- Bila t hitung lebih kecil t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$), maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel bebas tidak terpengaruh terhadap variabel terikat.



DAFTAR PUSTAKA

- BambangSubroto, 2005, Corporate Governance or Good Corruption Governance, Gramedia, Jakarta.
- DamodarGujarati, dan Dawn C Porter, 2010. Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1 Edisi 5. Salemba Empat.
- Deni, Khomsiyah dan Rika, 2001. “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”, The Institute for Corporate Governance (IICG), SNA VII Denpasar - Bali, 2-3 Desember.
- Eisenberg, T., Sundgren, S., Wells, M.T., 1998. **Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firm**. Jurnal of Financial Economics 48, 35-54
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2003. **Indonesian Company Law**. (www.fcgi.org.id)
- Ghozali, Imam. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Jensen, M.C., 1993. **The Modern Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control System**. The Journal of Finance Vol. 48, No 3, 831-880
- Midiastuty, Pranata P., dan Mas'udMachfoedz. 2003. **Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governancedan Indikasi Manajemen Laba**.
- Moeljono, dalam kaihatsu, 2005. **BudayaKorporatdanKeunggulanKorporasi**, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004. **Pedoman tentang komisaris independen**, hthh.www.governance-indonesia.or.id/main.htm.
- Rahmawati. 2006. **Model Penelitian Manajemen Laba pada Indusri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kineja Perbankan**

Rahmawati dan Zaki Badridwan. 2006. **Pengaruh Asimetri Informasi pada Hubungan antara Regulasi Perbankan, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba dengan Model Akrua Khusus Perbankan.** Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 6 No. 2. Agustus : 139-150

Scott, R. William. 2000. *Financial Accounting Theory Second Edition.* Prentice-Hall, New Jersey

Ujiyantho dan Pramuka, 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar

Setiawati dan Na'im. 2001. *Bank Health Evaluation Bay Bank Indonesia and Earning Management in Banking Industri.* Gadjah Mada International Journal of Business Volume 3. No 2. May : 159-176

Utama, Sidharta, dan F. Leonardo Z. 2006. *Audit Commite Composition, Control of Majority Shareholders and Their Impact on Audit Commite Effectiveness*

Zhou, Jian and Ken Y. Chen. 2004. *Audit Commite, Board Characteristics and Earnings Management Bay Commercial Bank.*

www.idx.co.id

Watt and Zimmerman. 1986. *Positif Accounting Theory*

Watts, Ross L. 2003. *Consevatism in Accounting Part 1 : Explanations and Implications.* *Accounting Horizon*, Vol. 17:207-221